



Pendekatan Komunikasi Interpersonal dalam Pembangunan berdasarkan Perspektif Kultural (Studi Kasus : Pro-Kontra Pengembangan Pariwisata Pulau Meti di Kabupaten Halmahera Utara)

Yerik Afrianto Singgalen

Hospitality and Tourism Management Department, Faculty of Administration Business and Communciation Science, Atma Jaya Catholic University of Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 20 Februari 2020
Direvisi: April 2020
Tersedia: online: 30 Juli 2020

KATA KUNCI

Desa Meti;Halmahera Utara, Komunikasi Interpersonal; Meti Cottage; Pariwisata

KORESPONDENSI

E-mail: yerik.afrianto@atmajaya.ac.id

A B S T R A K

This article aims to describe the interpersonal communication approach for development based on the perspective of the Hibualamo culture for the people of Meti Village in the case of the pros and cons of tourism development on Meti Island in North Halmahera Regency. The research method used is qualitative with a case study approach. Meanwhile, the data collection technique used in-depth interviews, observation and document study. The results of this study indicate that the existence of the Tourism Industry in this case Meti Cottage on Meti Island can increase regional investment and maintain environmental sustainability, but it has not been able to provide economic and social benefits for local communities because of the pros and cons. Culturally, the interpersonal communication approach plays an important role in the level of public acceptance of increasing investment in the tourism industry. However, the conflict between the manager of the tourist attraction and the community related to empowerment and resource use has resulted in a disintegration of interests for sustainable tourism.

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan pembangunan pariwisata di daerah ialah konflik sosial antar individu dan golongan yang disebabkan oleh perdebatan kepemilikan lahan yang sah. Secara struktural, pendekatan hukum menjadi tolak ukur keabsahan kepemilikan lahan. Namun, secara kultural, pendekatan budaya juga menjadi nilai-nilai universal yang dipegang teguh masyarakat lokal sejak dahulu. Kedua pendekatan ini menjadi penting untuk diintegrasikan seiring dengan perkembangan sistem birokrasi pemerintahan daerah tanpa hours mengabaikan norma-norma kebudayaan lokal. Oleh sebab itu, pendekatan komunikasi interpersonal menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam proses

mediasi untuk meminimalisir potensi konflik sosial akibat sengketa lahan. Selain itu, pendekatan komunikasi interpersonal juga menjadi bagian dari kultur masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara yang dikenal dengan istilah *Hibualamo* (Singgalen, Sasongko and Wiloso, 2018).

Proses pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari nilai-nilai budaya lokal. Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, pedalaman dan daerah kepulauan masih memegang teguh tradisi serta berpartisipasi aktif dalam ritual adat (Singgalen, Sasongko and Wiloso, 2019). Penguatan budaya *Hibualamo* dalam pembangunan daerah menjadi perekat sosial yang menumbuhkan kepercayaan,

norma dan jejaring sebagai modal sosial (Singgalen, Sasongko and Wiloso, 2017). Selain itu, budaya juga menjadi resolusi konflik masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 1999-2000 (Safi, 2017; Djurubasa, 2018). Dalam praktik kebudayaan *Hibualamo*, komunikasi interpersonal menjadi esensi dari terbentuknya modal sosial. Para pemangku adat sebagai sesepuh atau pemimpin desa yang dikenal sebagai (*Kimalaha/Hamente*) juga menerapkan pendekatan komunikasi interpersonal untuk mengatasi pelbagai masalah sosial agar dapat diselesaikan tanpa kekerasan atau tindakan anarkis.

Dalam upaya pengembangan pariwisata di daerah Kabupaten Halmahera Utara, komunikasi berperan penting untuk menciptakan suasana kondusif yang mampu mewujudkan sapa pesona dan sadar wisata. Komunikasi yang tidak terjalin antara masyarakat dengan pengusaha di sektor industri pariwisata cenderung menimbulkan konflik dan penolakan (Huimin and Ryan, 2012). Demikian juga sebaliknya, komunikasi antara pelbagai pemangku kepentingan yang terjalin dengan baik dapat menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan. Oleh sebab itu, kajian tentang komunikasi interpersonal yang dihubungkan dengan kebudayaan di Halmahera Utara dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan aras lokal terkait dengan upaya meminimalisir konflik sosial yang menghambat keberlanjutan pariwisata di daerah.

Kajian tentang komunikasi interpersonal dalam hubungannya dengan kultur dan industri pariwisata, masih sangat minim dan perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) dalam literatur yang perlu ditingkatkan. Kajian tentang komunikasi dalam hubungannya dengan pengembangan pariwisata, identik dengan aspek kultural. Hal tersebut dapat dilihat dari kajian pengembangan model komunikasi pariwisata berbasis kearifan lokal sebagai pendekatan praktis dalam pembaharuan nuansa wisata (Nugraha, Perbawasari and Zubair, 2017; Bakti *et al.*, 2018). Selain itu, komunikasi interpersonal juga juga memengaruhi kinerja pegawai di Dinas Pariwisata (Pramono, 2017) maupun sebagai karyawan Hotel sebagai bagian dari Industri Pariwisata (Widiantoro, Sukarti and Budiharto, 2017). Selain itu, kearifan lokal dalam konteks kultural juga merupakan salah satu model

komunikasi dalam sektor pariwisata (Rohimah, Hariyoko and Ayodya, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa uraian tentang pendekatan komunikasi interpersonal dalam pembangunan berdasarkan perspektif kultural dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pembangunan, pariwisata dan komunikasi.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kasus pro dan kontra pengembangan pariwisata di Pulau Meti, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Konstruksi gagasan peneliti terkait narasi kultural dan pendekatan komunikasi interpersonal dapat dilihat dari dua perspektif yakni perspektif : pertama, perspektif kultural masyarakat Desa Meti terkait dengan nilai kebudayaan *Hibualamo* tentang komunikasi dan interaksi sosial (Boediman, 2019; Duan, 2019; Nakrowi, 2019); kedua, perspektif struktural, kebijakan pengembangan pariwisata dalam perspektif George Doxey Irridex yang berhubungan dengan aspek sosial dan budaya lokal (Arcana, 2016; Sutarya, 2017; Yadnya and Adikampana, 2019). Dengan demikian, artikel ini dapat menggambarkan secara utuh pendekatan komunikasi interpersonal dalam pembangunan berdasarkan perspektif kultural, studi tentang pro dan kontra pengembangan pariwisata di daerah.

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Halmahera Utara penting untuk diteliti melalui kajian ilmiah. Berdasarkan data kunjungan wisatawan yang terhimpun dan terdokumentasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara secara berkala dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terjadi fluktuasi. Adapun, intensitas kunjungan wisatawan didominasi wisatawan nusantara atau domestik dibandingkan dengan wisatawan mancanegara. Pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan nusantara atau domestik mencapai angka 45.175 sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 313. Pada tahun 2015, kunjungan wisatawan nusantara atau domestik meningkat di kisaran 65.034 sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara menurun ke angka 291. Penurunan kunjungan wisatawan nusantara atau domestik terjadi secara drastis terjadi di tahun 2016, hingga mencapai angka 30.175. Demikian juga kunjungan wisatawan mancanegara yang menurun hingga di kisaran angka 175.

Penurunan jumlah kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh pelbagai aspek, sehingga perlu ditelusuri secara ilmiah. Dalam konteks riset ini, asumsi tentang penurunan kuantitas kunjungan wisatawan ke pelbagai objek wisata di Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini kunjungan wisatawan ke Objek Wisata Tanjung Meti disebabkan oleh adanya Pro dan Kontra tentang aspek manajerial pengembangan industri pariwisata yang memanfaatkan sumberdaya perairan Pulau Meti. Hal ini menjadi dasar pemikiran untuk mengulas aspek kultural dari pendekatan komunikasi interpersonal serta menghubungkannya dengan perspektif *George Doxey Iridex*.

Asumsi pelaksanaan riset ini juga distimulus oleh hasil penelitian terdahulu yang mengidentifikasi pelbagai pengaruh penurunan kunjungan wisatawan, salah satunya ialah kerusakan fasilitas pariwisata yang memicu persepsi negatif (Wiradiputra and Brahmanto, 2016). Setelah dilakukan penelusuran masalah penelitian secara kontekstual di Desa Meti maka dapat diperoleh gambaran pro-kontra yang memengaruhi pengembangan objek wisata. Konflik manajemen antara pengelola dengan masyarakat juga terjadi di Tahura Djuanda, Jawa Barat (Fitriyana, 2016). Studi tentang konflik pada kawasan pariwisata sangat beragam dengan stimulus yang berbeda. Konflik dapat dipetakan pada aspek kultural maupun struktural di ruang individu maupun kelompok sebagaimana konteks Lombok dan Badung (Asikin, 2014; Haes, 2019). Studi terdahulu memberikan gambaran bahwa konflik dalam dinamika pengembangan sektor pariwisata daerah bersifat kontekstual. Demikian halnya pendekatan komunikasi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, fokus kajian ini mengulas pendekatan komunikasi interpersonal pada ranah kultural.

Otentikasi riset di Pulau Meti, menggambarkan adanya integrasi kultural melalui pendekatan komunikasi interpersonal. Dalam birokrasi pengembangan pariwisata dengan karakteristik struktural yang dominan, hal-hal kontradiktif yang berhubungan dengan paradigma kultural rentan memicu konflik. Apalagi pembatasan akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya perairan untuk kepentingan pariwisata. Bagaimanapun juga, ruang

demokrasi di Indonesia tidak memperkenankan tindakan pemaksaan atau perampasan ruang hidup masyarakat desa, hanya untuk kepentingan investasi di sektor pariwisata. Dengan demikian, peluang kontribusi secara ilmiah dari hasil penelitian ini ialah pendekatan komunikasi interpersonal pembangunan berdasarkan perspektif kultural melalui studi kasus Pro-Kontra pengembangan pariwisata Pulau Meti di Kabupaten Halmahera Utara.

LITERATUR DAN METODOLOGI

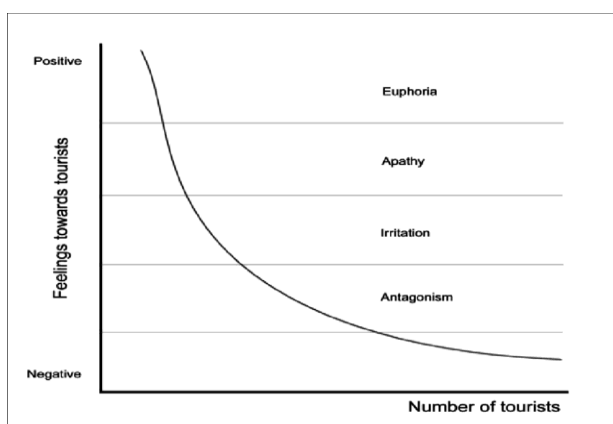
Popularitas kajian tentang komunikasi berkembang seiring dengan kemajuan teknologi (Zubair, 2017). Teknologi Informasi menjadi media komunikasi interpersonal (Kurmia, 2005). Riset tentang komunikasi melalui media sosial menjadi populer di kalangan akademisi maupun praktisi dalam pelbagai kasus (Watie, 2016). Seiring dengan perkembangan teknologi dan metode komunikasi yang variatif, sikap dan perilaku individu dalam berkomunikasi juga mengalami perubahan yang signifikan (Ramadhani, 2013). Disisi lain, komunikasi berperan penting dalam mengantisipasi dan mengatasi konflik (Beden and Zahid, 2016) akibat kesalahpahaman (Paradhisa, 2012). Heterogenitas masyarakat multikultur menunjukkan formasi sosial yang beragam serta mencerminkan diversitas pola komunikasi berbasis sosio-kultural. (Heryadi and Silvana, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa pola komunikasi terbentuk berdasarkan formasi sosio-kultural.

Pola komunikasi berbasis kearifan lokal sering digunakan untuk mempererat hubungan sosial suatu komunitas dengan nilai kultur yang sama untuk mencapai tujuan melalui tindakan kolektif. Gerakan sosial berbasis kearifan lokal merupakan salah satu bentuk hasil komunikasi yang membentuk suatu gerakan bersama (Darmastuti *et al.*, 2016). Selain itu, pola komunikasi antar kelompok juga dapat berubah seiring dengan muatan kepentingan di dalamnya (Nugroho, Lestari and Wiendijarti, 2012). Perubahan pola komunikasi juga dapat menjadi stimulus perubahan penghidupan masyarakat (Azharie, 2015). Dalam konteks pariwisata, komunikasi berperan dalam mendukung basis ekonomi kerakyatan (Setyowati, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa perspektif komunikasi masih dapat diperdalam untuk menguraikan

pelbagai studi kasus pembangunan hingga konteks kebudayaan.

Komunikasi interpersonal dalam pembangunan pariwisata merupakan strategi untuk mencapai keberlanjutan. Strategi pemasaran destinasi pariwisata cenderung menggunakan pola komunikasi interpersonal untuk meningkatkan kinerja pegawai di sektor pariwisata (Qorib and Syahida, 2018). Namun, pola komunikasi interpersonal juga berpotensi sebagai stimulus perubahan struktur dan fungsi sosial-budaya seperti akulturasi dan asimilasi akibat intensifitas interaksi sosial multikultural (Paramita, 2017). Selain itu, struktur dan fungsi sosial juga membentuk pola komunikasi interpersonal yang terintegrasi dengan kearifan lokal (Karim, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan pola interaksi yang konstruktif berdasarkan konteks habitus masyarakat lokal. Oleh sebab itu, pendekatan komunikasi interpersonal berbasis kultur dapat menjadi resolusi konflik dan tindakan kolektif untuk mencapai tujuan pembangunan di pelbagai sektor.

Pendekatan komunikasi interpersonal dalam pembangunan berdasarkan konteks kultural yang sesuai dengan isu pariwisata dapat ditelaah menggunakan perspektif George Doxey Irridex (Diedrich and García-Buades, 2009; Zaidan and Kovacs, 2017; Zhang, Wong and Lai, 2018). Doxey menggambarkan perubahan sikap masyarakat lokal sebagai dampak dari aktivitas pariwisata (Zhang, Fyall and Zheng, 2015), sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Sumber:

Gambar 1 Teori Irritation Index Menurut George Doxy

Teori Irritation Index (Irridex) menjelaskan perubahan sikap masyarakat dalam beberapa tahapan. Pertama ialah *Euphoria*, pada tahap eksplorasi, masyarakat terlibat aktif dan menerima dengan senang hati kedatangan wisatawan seiring adanya keuntungan yang diperoleh. Kedua ialah *Apathy*, dimana kedatangan wisatawan terus meningkat hingga akhirnya menjadi sebuah industri, hubungan masyarakat lokal dengan wisatawan menjadi terbatas pada hubungan formal dan bisnis. Ketiga ialah *Irritation*, dimana masyarakat lokal tidak lagi tertarik dengan perilaku ataupun budaya yang dimiliki masing-masing pihak, masyarakat mulai berada pada posisi marginal seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan dan pekerja pendatang akibat berkembangnya industri pariwisata. Keempat ialah *Antagonism*, dimana masyarakat lokal mulai membenci pembangunan pariwisata di daerah akibat eksploitasi lingkungan dan budaya, hingga mengalami degradasi. Beberapa peneliti terdahulu menggunakan perspektif George Doxey Irridex untuk menguraikan perubahan sikap masyarakat lokal sebagai dampak dari pembangunan pariwisata (Vargas-Sánchez, Porrás-Bueno and Plaza-Mejía, 2011; Huimin and Ryan, 2012; Susilo, Avenzora and Hermawan, 2018; Prabawati, Kumbara and Pujaastawa, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa perspektif George Doxey Irridex menggambarkan interaksi sosial masyarakat lokal dengan wisatawan yang sifatnya kontekstual. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendekatan komunikasi interpersonal dapat dihubungkan dengan perspektif George Doxey Irridex, untuk mengidentifikasi pelbagai persoalan dalam pembangunan pariwisata.

Signifikansi teoretis menjadi pertimbangan penggunaan teori untuk menguraikan pendekatan komunikasi interpersonal dalam pembangunan berdasarkan perspektif kultural terutama pada kasus pro dan kontra pengembangan pariwisata yang menunjukkan betuk komunikasi dalam interaksi sosial antara wisatawan dengan masyarakat lokal serta interaksi sosial antara pengusaha industri pariwisata dengan masyarakat lokal. Konteks masyarakat yang diamati ialah masyarakat suku Lina (*Hoana Lina*) yang secara administrasi pemerintahan tercatat sebagai masyarakat Desa Meti. Adapun,

gambaran umum lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.



Sumber: Hasil Digitasi QGIS 2.18.4

Gambar 2 Lokasi Penelitian di Desa Meti

Gambar 2 merupakan hasil digitasi peta lokasi penelitian menggunakan aplikasi QGIS 2.18.4 sebagai gambaran lokasi penelitian ini yang terletak di Desa Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2011, Desa Meti menjadi salah satu destinasi wisata yang terdokumentasi dalam program pengembangan pariwisata daerah sebagai berikut :

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional di bidang pariwisata dan budaya; Melestarikan dan memberdayakan organisasi atau lembaga seni budaya tradisional dan kontemporer; Mengembangkan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan penunjang perekonomian daerah; Mencapai diversifikasi produk wisata; Mengoptimalkan sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona; Membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan di bidang pariwisata dan budaya. Meskipun demikian, pembangunan pariwisata di Pulau Meti terhambat dalam tahap mediasi untuk pembebasan lahan pribadi milik warga yang dinilai strategis sebagai lokasi objek wisata. Adapun, visualisasi lokasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.



Sumber: Dokumentasi Pribadi (24/12/2013)

Gambar 3 Kondisi Tanjung Pulau Meti di Desa Meti

Gambar 3 merupakan kondisi infrastruktur penunjang pariwisata yang didirikan oleh Dinas Pariwisata berdasarkan RIPPDA tahun 2011. Namun kondisi sarana dan prasarana tidak terawat dengan baik akibat minimnya koordinasi dan komunikasi pengelola objek wisata dengan Dinas Pariwisata tentang manajemen destinasi wisata. Hambatan koordinasi juga dipengaruhi oleh persoalan aksesibilitas yakni jarak dan waktu tempuh dari Tanjung Pulau Meti ke Kota Tobelo yang membutuhkan waktu dua jam menggunakan moda transportasi laut tradisional (Ketinting) dan moda transportasi darat. Selain itu, akses dari lokasi wisata ke permukiman warga membutuhkan waktu 20 menit menggunakan moda transportasi darat, dan 15 menit menggunakan transportasi laut. Hal ini menggambarkan bahwa jarak dan waktu tempuh juga memengaruhi fungsi koordinasi antara pengelola objek wisata dengan pemerintah Desa.

Pada tahun 2011, saluran koordinasi pengembangan destinasi wisata Meti menggunakan telepon genggam belum optimal karena keterbatasan akses jaringan seluler. Selain itu, komunikasi antara Dinas Pariwisata dengan pengelola objek wisata Meti tidak intensif dan konsisten, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan manajemen destinasi wisata. Hal tersebut menyebabkan masalah dalam hal koordinasi pembenahan infrastruktur penunjang aktivitas wisata yang mengalami kerusakan minor maupun mayor.

Berdasarkan kultur masyarakat Meti, pelbagai persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berdampak pada penghidupan bersama, seyogianya dirundingkan dengan melibatkan pemuda, pimpinan adat dan Kepala Desa, sebagaimana nilai-nilai tradisi lokal (*Higaro, Hirono, Makiriwo*). Melalui pendekatan komunikasi interpersonal berbasis kultur masyarakat Meti, upaya untuk bersinergi dalam tujuan pengembangan pariwisata menjadi lebih efektif dan efisien.

Pendekatan komunikasi interpersonal menjadi karakteristik utama dalam penyampaian informasi atau dialog yang paling efektif untuk menghindari konflik akibat kesalahpahaman. Permasalahan yang tidak terselesaikan, menyebabkan lokasi objek wisata menjadi tidak

terawat dan menimbulkan kesan tidak aman dan tidak nyaman bagi wisatawan yang datang. Adapun, visualisasi kondisi infrastruktur yang rusak dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.



Sumber: Dokumentasi Pribadi (24/12/2013)

Gambar 4 Kerusakan Infrastruktur Pariwisata Pulau Meti

Gambar 4 menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur di objek wisata Pulau Meti tidak diatasi atau diperbaharui pengelola objek wisata lokal, bahkan tidak ada program rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang pariwisata oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Pariwisata. Selain itu, masyarakat lokal juga mulai mempertanyakan manfaat dari pengembangan objek wisata di Pulau Meti terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Meskipun, lahan yang dijadikan objek wisata merupakan milik pribadi tetapi aktivitas wisata berpengaruh terhadap penghidupan masyarakat sekitar. Kondisi objek wisata di Pulau Meti yang tidak terawat, menimbulkan kesan tidak aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung. Hasil identifikasi masalah menunjukkan bahwa pembenahan infrastruktur belum dapat dilakukan mempertimbangkan pro dan kontra antara pemerintah daerah dengan pengelola objek wisata dengan pemerintah daerah terkait masalah pembebasan lahan yang belum tuntas. Begitu juga pro dan kontra terjadi antara masyarakat lokal dengan pemerintah daerah terkait dengan manfaat ekonomis bagi masyarakat lokal dari pengembangan sektor pariwisata. Berdasarkan gambaran umum permasalahan pengembangan pariwisata di Pulau Meti, maka signifikansi penggunaan teori terhadap isu menjadi relevan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, untuk mempertahankan koherensi konteks dan konten penelitian yang memberikan gambaran permasalahan secara naratif. Adapun, teknik pengambilan data penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan

studi dokumen. Wawancara mendalam diperlukan untuk memperoleh informasi yang kredibel dan valid serta spesifik. Informan Kunci sebagai narasumber yang terlibat dalam wawancara mendalam ialah Tokoh Masyarakat Lokal, Tokoh Pemuda Gereja, Tokoh Pemuda Karang Taruna, Masyarakat Desa Meti yang memiliki mata pencaharian dari aktivitas melaut (Nelayan), Bercocok Tanam (Petani) maupun mata pencaharian sebagai penyedia jasa transportasi laut tradisional (Perahu Ketinting), Nelayan, Petani dan Pedagang di Desa Meti, Ketua Adat, Kepala Desa, Pengelola Objek Wisata, dan Pimpinan aras Kecamatan. Standar kualifikasi narasumber yang ditetapkan sebagai informan kunci ialah : peran aktif dalam mediasi masalah sengketa lahan; berdomisili di Desa Meti dan memahami konteks sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan di Desa Meti. Studi dokumen dibutuhkan untuk memperoleh gambaran pengembangan pariwisata di Pulau Meti. Adapun, dokumen-dokumen yang dipelajari ialah : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW), Data Kunjungan Wisatawan ke Desa Meti, serta Rencana Pengembangan Objek Wisata Meti oleh Dinas Pariwisata. Selanjutnya, teknik triangulasi digunakan dalam proses pengolahan data untuk memperoleh informasi yang sah.

Upaya mengantisipasi bias dalam pengolahan data ialah dengan memastikan kembali koherensi pokok permasalahan penelitian berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi, dan hasil studi dokumen. Tantangan dalam proses pengolahan data penelitian ialah proses penyaringan subjektivitas narasumber yang perlu diklarifikasi kebenarannya untuk memperoleh informasi yang kredibel sebagai pendukung argumen peneliti ketika menarasikan hasil temuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini terbagi menjadi dua topik yakni : Pertama, pendekatan interpersonal dalam pembangunan berdasarkan perspektif kultural yang merupakan hasil rekonstruksi gagasan peneliti secara teoretis terhadap isu pembangunan pariwisata di daerah Kabupaten Halmahera Utara; Kedua, pro dan kontra pengembangan pariwisata di Pulau Meti,

tentang pentingnya komunikasi interpersonal dalam penyelesaian sengketa lahan untuk pembangunan pariwisata sehingga berkontribusi bagi pengembangan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan dalam perspektif George Doxey Irridex. Dengan demikian,

Pendekatan Komunikasi Interpersonal dalam Pembangunan berdasarkan perspektif Kultural

Pemahaman tentang pola komunikasi interpersonal berbasis kebudayaan perlu ditelusuri habitus masyarakat adat yang menjadi nilai-nilai kolektif maupun universal. Hasil riset ini menunjukkan bahwa pola komunikasi masyarakat Desa Meti terbentuk dari habitus sebagai masyarakat adat *Hoana Lina*. Sebelum terdokumentasi dalam sistem administrasi pemerintah daerah sebagai masyarakat yang bermukim di Desa Meti, masing-masing individu hidup secara komunal berbasis keluarga yang dikenal dengan istilah *Soa*. Selanjutnya, ikatan antar keluarga (*Soa*) membentuk identitas kesukuan yang dikenal dengan istilah *Hoana*. Dalam konteks Halmahera Utara, Masing-masing *Hoana* hidup dalam nilai universal *Hibualamo* sebagai identitas hubungan persaudaraan antar suku (Muller, 2018).

Pendekatan komunikasi interpersonal dalam konteks budaya *Hibualamo* memiliki hubungan dengan gaya kepemimpinan dalam struktur masyarakat adat *Hibualamo*. Sistem pemerintahan adat di Kabupaten Halmahera dikenal dengan istilah *O Higar* yang berarti saling mengajak satu sama lain. Pemimpin tertinggi dalam struktur masyarakat adat *Hibualamo* dikenal dengan gelar *Jiko Ma Kolano* (Raja Teluk). Pemimpin cenderung menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal untuk menyelesaikan persoalan internal maupun eksternal yang berhubungan dengan keberlangsungan masyarakat adat *Hibualamo*. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi menjadi basis utama pergerakan dalam struktur dan fungsi pemerintahan adat. Selain itu, dalam struktur masyarakat adat *Hibualamo* terdapat lembaga atau badan yang mengatur keamanan permukiman, tata nilai kehidupan, persoalan hukum adat dan sistem peradilan adat, pelestarian nilai dan pengembangan komunitas adat yang dikenal

sebagai *Adati Majojo* dan *Adati Magogoana*. Setiap pelanggaran dalam tradisi masing-masing *Hoana* akan dikenakan sanksi oleh pemangku adat, namun pendekatan komunikasi interpersonal memungkinkan adanya keringanan sanksi dengan transaksi (ganti rugi). Dalam proses negosiasi, objek material kebudayaan atau instrumen kebudayaan seperti sirih dan pinang serta tabako secara simbolik memberikan ruang untuk membicarakan ruang lingkup permasalahan dan maksud penyelesaian sengketa tanpa harus mengganti kerugian dengan beban yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal menjadi karakteristik utama penyelesaian masalah sosial, seperti mengucapkan kata kotor dalam acara yang sakral, menikah tanpa memperhatikan tali persaudaraan, sengketa lahan, dan sebagainya. Meskipun demikian, nilai-nilai kebudayaan mengalami perkembangan sesuai dengan tradisi masing-masing *Hoana* di Kabupaten Halmahera Utara.

Berdasarkan uraian tentang karakteristik komunikasi dalam perspektif kultur *Hibualamo* dapat diketahui bahwa kebudayaan juga merupakan bagian dari komunikasi simbolik yang mencerminkan keterampilan kelompok, pengetahuan, sikap, nilai, dan motif (Mughtar, Koswara and Setiawan, 2016). Komunikasi interpersonal dalam kultur *Hibualamo* masih berperan penting dalam menyelesaikan pelbagai masalah sosial di kalangan masyarakat Meti. Dominasi aspek kultural dalam perilaku sosial masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara seyogianya dipertimbangkan para pemangku kepentingan terutama pihak yang memiliki kewenangan untuk merumsukan arah kebijakan serta strategi pembangunan daerah agar terintegrasi dengan nilai-nilai kebudayaan untuk meminimalisir resistensi dan konflik akibat persoalan sosial dan ekonomi.

Komunikasi interpersonal dapat menggerakkan masyarakat agar terlibat aktif dalam proses pembangunan (Rinawati, 2006; Sulaiman, Sugito and Sabiq, 2017). Dalam ranah pembangunan pariwisata, pendekatan pengembangan pariwisata berbasis komunitas juga bertumpuh pada kapabilitas komunikasi interpersonal (Sero, 2012; Pandi Putra and Pratama, 2014; Farihanto, 2016). Di daerah pedesaan, komunikasi interpersonal memiliki peran yang sangat penting untuk percepatan

pembangunan ekonomi (Waskita, 2005; Amanah, 2010; Abdullah *et al.*, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi interpersonal dalam pembangunan selalu berdampak positif. Meskipun demikian, masing-masing konteks sosial dan budaya memiliki pola komunikasi tersendiri.

Pembangunan menyebabkan perubahan habitus atau pola kehidupan masyarakat. Implikasi perubahan pola kehidupan masyarakat juga menyebabkan perubahan pola komunikasi. Pendekatan kebudayaan dalam komunikasi akan berubah ketika terjadi akulturasi atau asimilasi (Romli, 2015). Demikian juga media atau instrumen komunikasi akan berubah seiring perkembangan teknologi informasi yang digunakan sebagai wadah komunikasi populer (Intyaswati and Laura, 2017; Briliana and Destiwati, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi interpersonal dalam pendekatan kultural tidak bersifat konservatif melainkan kontekstual (Fathurrohman, Halim and Imawan, 2017).

Berdasarkan hasil diskusi tentang pendekatan komunikasi interpersonal dalam pembangunan berdasarkan perspektif kultural, dapat diketahui bahwa habitus atau pola kehidupan masyarakat cenderung menentukan efektifitas penggunaan pendekatan interpersonal dalam pembangunan. Dalam konteks budaya *Hibualamo*, pendekatan komunikasi interpersonal digunakan dalam proses negosiasi sanksi adat. Dominasi nilai budaya khususnya pola komunikasi interpersonal menunjukkan bahwa program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah seyogianya menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal dalam tahap sosialisasi perencanaan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat lokal dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan sebagai mitra pemerintah. Selain itu, persoalan pembangunan yang berkaitan dengan konflik sosial akibat sengketa lahan maupun perbedaan pandangan politik, dapat diatasi menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal. Namun, sejauh ini persoalan sosial tidak selalu diselesaikan dengan pendekatan komunikasi interpersonal sehingga menimbulkan perlawanan masyarakat yang mengakibatkan proses pembangunan tidak bersifat partisipatif.

Pro dan Kontra Pengembangan Pariwisata di Pulau Meti dalam Perspektif George Doxey Irridex

Pembangunan yang tidak partisipatif cenderung menimbulkan pro dan kontra. Dalam konteks pembangunan pariwisata di Pulau Meti, pro dan kontra berawal dari ketidakjelasan program pembebasan lahan milik pribadi yang akan dikembangkan sebagai objek wisata. Konsekuensi dari ketidakjelasan program tersebut menimbulkan perlawanan antara pemilik lahan dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata yang terjewantahkan dalam sikap ketidakpedulian pengelola terhadap sarana dan prasarana penunjang aktivitas pariwisata sehingga menjadi tidak terawat dan rusak. Tidak optimalnya pengawasan dan pengembangan objek wisata menyebabkan wisatawan yang berkunjung menjadi tidak aman dan nyaman ketika berwisata di Tanjung Pulau Meti sehingga kuantitas kunjungan wisatawan mengalami penurunan.

Penurunan kuantitas kunjungan wisatawan menyebabkan minimnya pendapatan masyarakat yang bekerja sebagai penyedia jasa transportasi laut tradisional (perahu ketinting). Selain itu, kondisi objek wisata yang sepi menyebabkan masyarakat lokal yang bekerja sebagai nelayan substantif bebas melakukan penangkapan ikan di perairan Tanjung Meti. Apabila dibandingkan dengan arah kebijakan dan strategi pengembangan dalam RIPPDA Kabupaten tahun 2011, Objek Wisata Pulau Meti seyogianya telah menjadi salah satu daerah wisata unggulan di daerah Kabupaten Halmahera Utara. Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan pariwisata di Desa Meti, Dinas Pariwisata menyelenggarakan sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD), seperti pada gambar 5 berikut ini.



Sumber: Widia Salamat (27/9/2016)

Gambar 5. FGD Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Tanjung Meti

Gambar 5 menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata berupaya untuk menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan di Desa Meti dalam upaya menyelesaikan masalah dalam pengembangan objek wisata di Pulau Meti, sekaligus melakukan sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona. Hasil dari FGD, menjadi rekomendasi program pengembangan objek wisata di Pulau Meti. Seiring perkembangannya, pemilik lahan mengambil keputusan untuk menjalin kontrak kerjasama dengan pemilik modal asal Perancis untuk menyewakan lahan milik pribadi sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Dengan demikian, pemilik modal asing mendirikan usaha jasa akomodasi dan layanan pariwisata dengan nama Meti Cottage. Adapun, visualisasi Meti Cottage dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini.



Sumber: Steve Recaldo Karimang (10/02/2020)

Gambar 6 Meti Cottage di Pulau Meti

Gambar 6 merupakan gambaran objek wisata di Tanjung Meti setelah dikembangkan oleh sektor swasta dalam hal ini Meti Cottage. Pada tahap awal pembangunan infrastruktur Meti Cottage, pendekatan komunikasi interpersonal digunakan pengusaha industri pariwisata untuk memperkenalkan konsep pengembangan serta manfaat dari pengembangan pariwisata bagi masyarakat lokal yang bekerja sebagai petani, nelayan dan pedagang, pemerintah Desa Meti, pemerintah Kecamatan Tobelo Timur, dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Meskipun demikian, pendekatan komunikasi interpersonal yang diselenggarakan tidak selaras dengan konteks kultur sehingga menyebabkan

sejumlah perlawanan dari kalangan masyarakat. Bentuk perlawanan terkait keberadaan Meti Cottage distimulus oleh kesalahpahaman akibat isu provokatif yang muncul di kalangan masyarakat. Masyarakat yang menolak keberadaan Meti Cottage berasumsi bahwa aktivitas Meti Cottage tidak seharusnya membatasi penghidupan masyarakat sebagai nelayan yang hendak menangkap ikan di perairan tanjung Pulau Meti (Sekitar Meti Cottage), apalagi untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga (makanan). Masyarakat Desa Meti sejak dahulu menangkap ikan di perairan tanjung Pulau Meti namun tidak lagi diperbolehkan dengan alasan perlindungan dan pengawasan keberlangsungan terumbu karang yang menjadi daya tarik wisatawan. Selain itu, masyarakat lokal yang bekerja sebagai penyedia jasa transportasi laut tradisional (Perahu Ketinting) berasumsi bahwa pengaturan harga jasa penyebrangan dari Desa Mawea menuju Pulau Meti justru merugikan penyedia jasa transportasi laut tradisional (Perahu Ketinting) karena harga telah diatur sepihak oleh pengusaha Meti Cottage. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu nelayan yang juga memanfaatkan perahu pribadi sebagai jasa angkutan laut wisatawan, berinisial RT. Adapun, kutipan hasil wawancara dalam bahasa lokal telah dikonversi menjadi Bahasa Indonesia : sebagai berikut :

“Sejak dahulu, orang tua kami selalu memancing di sekitar tanjung, mereka pulang membawa ikan untuk kami santap bersama (keluarga). Ketika tanjung Meti menjadi objek wisata, kami dilarang untuk memancing disana. Bukankah aneh ? ketika kami menetapkan tarif angkutan (Rp.10.000/orang), justru kami dilarang menurunkan penumpang langsung ke jembatan dan harus patuh pada pengelola yang menetapkan tarif (Rp.5000/orang). Sementara itu, intensitas penumpang yang berkunjung tidak selalu konsisten, bagaimana bisa cukup untuk mengganti biaya bahan bakar sekali perjalanan ? hal itu kan tidak adil. Masa pemerintah tidak ada kebijakan yang menguntungkan masyarakat malah melindungi investor. Kami adalah penghuni pulau Meti, Seharusnya ini dibicarakan baik-baik secara adat, supaya tidak ada masalah. Pengelola, Pemerintah, dan Masyarakat, sama-sama diuntungkan”

Padahal, pengusaha Meti Cottage bermaksud untuk memperoleh kesepakatan tentang harga baku jasa transportasi yang akan dipublikasikan kepada khalayak umum sebagai calon wisatawan. Adapun, pengaturan harga yang sesuai dengan kapabilitas konsumen akan meningkatkan intensitas kunjungan wisatawan tetapi juga tidak melebihi daya dukung lingkungan di Objek Wisata Pulau Meti. Sebagaimana hasil wawancara bersama pengelola Meti Cottage, Pak Ady :

“Mempertimbangkan jumlah kerusakan terumbu karang di perairan Tanjung Meti akibat aktivitas pengeboman (Bom Ikan) maka aktivitas penangkapan ikan di sekitar Tanjung, seyogianya diminimalisir atau tidak dilakukan oleh nelayan. Pada tahap awal promosi wisata Meti, tarif transportasi laut seyogianya disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan kesan ditipu oleh wisatawan yang hendak berkunjung ke Meti. Selain itu, faktor keamanan menjadi penting, sehingga minuman keras dilarang untuk dikonsumsi disini. Kami juga sangat memperhatikan persoalan sampah, sehingga pengunjung dihimbau untuk tidak meninggalkan sampah plastik, bahkan kalau bisa tidak perlu membawa minuman atau makanan dalam kemasan plastik sekali pakai. Kami dari pihak pengelola Meti Cottage, menyediakan makanan dan minuman untuk mengantisipasi persoalan sampah yang mencemari lingkungan sekitar Tanjung Meti”

Kesalahpahaman antar pemangku kepentingan yang tidak terakomodir dalam komunikasi interpersonal mendorong oknum-oknum tidak bertanggungjawab melakukan tindak vandalisme dan teror terhadap pengusaha Meti Cottage. Hal tersebut memengaruhi tingkat keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pulau Meti.

Dalam perspektif George Doxey Irridex tentang relasi antara masyarakat lokal sebagai tuan rumah dengan wisatawan maupun pengusaha industri pariwisata menunjukkan adanya dinamika yang sifatnya kontekstual (Cordero, 2008). Apabila dihubungkan dengan konteks tingkat penerimaan masyarakat Desa Meti terhadap wisatawan dan pengusaha pariwisata, dapat diketahui bahwa pro dan kontra pengembangan pariwisata di Pulau Meti masih

dapat diselesaikan dengan pendekatan interpersonal berbasis kultur yang relevan dengan konteks budaya masyarakat Desa Meti. Hal ini menjadi penting untuk diselenggarakan guna mengakomodir perspektif seluruh komponen masyarakat desa dan komunitas pemuda agar terlibat dalam pengembangan pariwisata di Pulau Meti. Komunikasi yang terjalin dengan baik antar pemangku kepentingan dapat mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan (Fairuz, 2017). Dengan demikian, proses dimana pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan dari perspektif yang berbeda dapat secara konstruktif mempertemukan perbedaan dan mencari solusi dari sudut pandang mereka. Komunikasi yang intensif sangat penting dalam kolaborasi, dengan demikian ada nilai tambah dari deliberasi yang terjadi antar pemangku kepentingan pariwisata. Pengembangan objek wisata seyogianya tidak didominasi oleh sektor swasta tetapi juga sektor publik dan masyarakat lokal, oleh sebab itu pendekatan komunikasi interpersonal dilakukan untuk mencapai pemahaman dan komitmen bersama.

Pembangunan partisipatif dalam sektor pariwisata dikenal sebagai pendekatan pariwisata berbasis komunitas atau masyarakat (Iorio and Corsale, 2014; Taylor, 2017). Komunikasi interpersonal dapat mendorong keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat serta memberikan keuntungan sosial dan ekonomi dalam pembangunan desa (Kurniawan, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal berperan penting dalam pembentukan pola komunikasi yang kolaboratif antar pelbagai pemangku kepentingan sehingga mampu mendorong pariwisata yang berkelanjutan (Leman, 2018). Selain itu, implementasi pendekatan komunikasi interpersonal berbasis kultur lokal tidak seyogianya mengintervensi secara keseluruhan ruang kebudayaan yang sifatnya sakral untuk dikomersialkan sebagai atraksi budaya (La ode unga, 2011). Keberhasilan pendekatan komunikasi interpersonal sebagai perekat sosial seyogianya memperhatikan aspek kerentanan masyarakat yang dapat menyebabkan degradasi nilai budaya otentik akibat akulturasi atau asimilasi (Romli, 2015).

Konteks pengembangan pariwisata di Pulau Meti menunjukkan adanya pertimbangan

etis pada aspek sosial dan budaya yang memengaruhi pola interaksi sosial. Masyarakat Desa Meti memiliki kecenderungan menolak pendekatan pembangunan yang menyebabkan degradasi nilai sosial-budaya. Masyarakat Desa Meti juga menolak pendekatan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Hal tersebut memengaruhi sikap dan perilaku terhadap keberadaan pemilik modal yang hendak berinvestasi di Desa Meti. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa paradigma pembangunan masyarakat Desa Meti lebih menekankan pada aspek substansial yakni fungsi pengendalian dampak pembanguann terhadap keberlangsungan penghidupan masyarakat lokal.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi interpersonal dalam pembangunan berdasarkan perspektif kultural menunjukkan adanya relevansi teoretis dengan fakta empiris, melalui studi kasus pro dan kontra pengembangan pariwisata di Pulau Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Berdasarkan kultur *Hibualamo*, pendekatan komunikasi interpersonal menjadi karakteristik utama yang efektif digunakan masyarakat Meti sebagai Hoana Lina untuk menyelesaikan pelbagai persoalan pelanggaran adat. Selain itu, pendekatan komunikasi interpersonal dalam kultur *Hibualamo* juga memengaruhi perilaku masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi interpersonal dapat digunakan sebagai strategi untuk mencapai kolaborasi yang saling menguntungkan antar pelbagai pemangku kepentingan di sektor pariwisata. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan komunikasi interpersonal sebagai pendekatan utama dalam perencanaan pembangunan pariwisata di Desa Meti, sekaligus menjadi pendekatan dalam menyelesaikan masalah sosial yang disebabkan oleh kesalahpahaman antar pelbagai pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Y. *et al.* (2011) 'Komunikasi dan pembangunan komuniti peringkat desa: berkongsi pengalaman antara Indonesia

dengan Malaysia', *Jurnal Melayu*, 6(6), h. 227–237.

- Amanah, S. (2010) 'Peran komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir', *Komunikasi Pembangunan*, 08(1), h. 1–19. Tersedia di: <http://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/article/view/5691/43>
- Arcana, K. T. P. (2016) 'Persepsi Masyarakat Lokal Terhadap Perkembangan Akomodasi Pariwisata Studi Kasus: Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Bali', *Analisis Pariwisata*, 16(1), h. 52–60.
- Asikin, Z. (2014) 'Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlantar Di Gili Trawangan Lombok)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), h. 239–250. doi: 10.20884/1.jdh.2014.14.2.293.
- Azharie, S. (2015) 'Pola Komunikasi Antara Pedagang dan Pembeli di Desa Pare, Kampung Inggris Kediri', *Jurnal Komunikasi*, 7(2), h. 207–233.
- Bakti, I. *et al.* (2018) 'Pengembangan Model Komunikasi Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kawasan Geopark Pangandaran', *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), h. 217. doi: 10.24198/jkk.v6i2.18459.
- Beden, S. and Zahid, I. (2016) 'Pemetaan Struktur Peristiwa Bahasa: Komunikasi Bebas Konflik', *GEMA Online Journal of Language Studies*, 16(1), h. 67–87.
- Boediman, L. (2019) 'Belajar dari Spiritualitas Masyarakat Hibualamo untuk Pengembangan Teologi Kontekstual', *Hibualamo*, 2(2), h. 40–45.
- Briliana, C. N. N. and Destiwati, R. (2019) 'Pola Komunikasi Virtual Grup Percakapan Komunitas Hamur "HAMURinspiring" Di Media Sosial Line', *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 3(1), h. 34. doi: 10.24198/jmk.v3i1.12045.

- Cordero, M. J. C. (2008) 'Residents' Perception of Tourism: A Critical Theoretical and Methodological Review', *Ciencia Ergo Sum*, 15(1), pp. 35–44.
- Darmastuti, R. *et al.* (2016) 'Gethok Tular, Pola Komunikasi Gerakan Sosial Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Samin di Sukolilo', *Jurnal ASPIKOM*, 3(1), h. 104. doi: 10.24329/aspikom.v3i1.103.
- Diedrich, A. and García-Buades, E. (2009) 'Local perceptions of tourism as indicators of destination decline', *Tourism Management*, 30(4), pp. 512–521. doi: 10.1016/j.tourman.2008.10.009.
- Djurubasa, G. (2018) 'Identitas Agama dan Suku Masyarakat Adat Pasca Konflik Berdarah di Halmahera Utara', *Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 4(1), h. 1–20.
- Duan, J. E. (2019) 'Gikiri Moi: Konsep Tuhan Orang Tobelo dan Pengaruhnya terhadap Pemahaman Iman Kristen', *Hibualamo*, 3(2), h. 45–50.
- Fairuza, M. (2017) 'Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)', *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), h. 1–13.
- Farihanto, M. N. (2016) 'Dinamika Komunikasi dalam Pembangunan Desa Wisata Brayut Kabupaten Sleman', *Dinamika Komunikasi dalam Pembangunan Desa*, 19(3), h. 203–2014.
- Fathurrohman, R., Halim, A. and Imawan, K. (2017) 'Pengaruh Komunikasi Virtual Terhadap Komunikasi Interpersonal Dikalangan', *Signal*, 5(1), h. 1–10.
- Fitriyana, D. (2016) 'Konflik Manajemen Antara Pengelola Dan Masyarakat Di Tahura Djuanda, Bandung, Jawa Barat', *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 2, h. 111–123. doi: 10.24843/jumpa.2016.v02.i02.p07.
- Haes, P. E. (2019) 'Kontribusi Serikat Pekerja Indonesia pada Organisasi Pariwisata di Kabupaten Badung dalam Perspektif Konflik', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), h. 114–125.
- Heryadi, H. and Silvana, H. (2013) 'Komunikasi Antarbudaya Dalam Masyarakat Multikultur', *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(1), h. 95–108. doi: 10.24198/jkk.vol1n1.9.
- Huimin, G. and Ryan, C. (2012) 'Tourism destination evolution: A comparative study of Shi Cha Hai Beijing Hutong businesses' and residents' attitudes', *Journal of Sustainable Tourism*, 20(1), pp. 23–40. doi: 10.1080/09669582.2011.610511.
- Intyaswati, D. and Laura, R. (2017) 'Peningkatan Eksistensi Blogger melalui Komunitas Virtual', *Jurnal The Messenger*, 9(2), h. 210–218. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Iorio, M. and Corsale, A. (2014) 'Community-based tourism and networking: Viscri, Romania', *Journal of Sustainable Tourism*, 22(2), pp. 234–255. doi: 10.1080/09669582.2013.802327.
- Karim, A. B. (2010) 'Pariwisata; Antara Tuntutan Industri Dan Kearifan Lokal', *Abuya Busro Karim*, 159, h. 1–13.
- Kurmia, N. (2005) 'Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Baru: Implikasi terhadap Teori Komunikasi', *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(2), h. 291–296. doi: 10.29313/mediator.v6i2.1197.
- Kurniawan, W. (2015) 'Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang', *Economics Development Analysis Journal*, 4(4), h. 443–451. doi: 10.15294/edaj.v4i4.14851.
- Leman, L. A. (2018) 'Kolaborasi antar Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Religi Sunan Giri di Kabupaten Gresik', *Kebijakan dan Manajemen PublikK*, 6(2), h. 1–11.

- Muchtar, K., Koswara, I. and Setiawan, A. (2016) 'Jurnal Manajemen Komunikasi Komunikasi Antar Budaya Dalam Perspektif Antropologi', *Jurnal Management Komunikasi*, 1(1), h. 1/16.
- Muller, S. (2018) *Die Wirkmächtigkeit von masyarakad adat Aushandlungen um Kultur und Identität im Rahmen der Indigenenbewegung in Indonesien*.
- Nakrowi, Z. S. (2019) 'Persepsi Masyarakat Suku Tobelo terhadap Perilaku Tutur Suku Jawa sebagai Pendatang', *Hibualamo*, 3(1), h. 54–59.
- Nugraha, A. R., Perbawasari, S. and Zubair, F. (2017) 'Model Komunikasi Pariwisata yang Berbasis Kearifan Lokal', *Jurnal The Messenger*, 9(2), h. 231. doi: 10.26623/themessenger.v9i2.468.
- Nugroho, A. B., Lestari, P. and Wiendijarti, I. (2012) 'Pola Komunikasi Antarbudaya Batak dan Jawa di Yogyakarta', *Jurnal ASPIKOM*, 1(5), p. 403. doi: 10.24329/aspikom.v1i5.44.
- La ode unga, K. (2011) 'Strategi pengembangan kawasan wisata kepulauan banda', (1), p. 200p.
- Pandi Putra, I. W. I. and Pratama, R. A. (2014) 'Reshaping the Culture: Improving and Integrating Social Capital to Affirm Land Use Control A Case of Bali in Democratic Decentralization Era', *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 1(1), p. 51. doi: 10.14710/ijpd.1.1.51-56.
- Paradhisa, N. Z. (2012) 'Konflik Kepentingan Daerah : Studi Kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Blitar', *Jurnal Politik*, 2(1), h. 136–146.
- Paramita, S. (2017) 'Lokal Perspektif Komunikasi Pariwisata Masyarakat Di Desa Sade Lombok', *Jurnal Visi Komunikasi*, 53(9), h. 146–156. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Prabawati, N. P. D., Kumbara, A. A. N. A. and Pujaastawa, I. B. G. (2019) 'Implikasi Kunjungan Wisatawan Gay Di Seminyak, Bali', *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 05(2), p. 371. doi: 10.24843/jumpa.2018.v05.i02.p09.
- Pramono, K. (2017) 'Pengaruh Komunikasi Interpersonal antar Pegawai terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara', *Jurnal Komunitas*, 5(1), h. 39–46.
- Qorib, F. and Syahida, A. R. (2018) 'Pola Komunikasi Pariwisata Pengrajin Keramik Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang', *Reformasi*, 8(2), h. 151. doi: 10.33366/rfr.v8i2.1102.
- Ramadhani, R. (2013) 'Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak dalam Membentuk Perilaku Positif Anak pada Murid SDIT Cordova Samarinda', *e-Journal Ilmu Komunikasi*, 1(3), h. 112–121. doi: ejournal.ilkom. fisip-unmul.ac.id.
- Rinawati, R. (2006) 'Komunikasi dan Pembangunan Partisipatif', *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 7(2), h. 175–184. doi: 10.29313/mediator.v7i2.1285.
- Rohimah, A., Hariyoko, Y. and Ayodya, B. P. (2018) 'Kearifan Lokal Sebagai Salah Satu Model Komunikasi Pariwisata di Desa Carangwulung, Kabupaten Jombang', *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 4(2), h. 42–49.
- Romli, K. (2015) 'Akulturasi dan Asimilasi dalam konteks interaksi Antar Etnik', *IJTIMAIYA*, 8(1), h. 1–13.
- Safi, J. (2017) 'Konflik Komunal: Maluku 1999-2000', *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 13(1). doi: 10.21831/istoria.v13i1.17615.
- Sero, A. (2012) 'Model Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara', *Jurnal Nasional Pariwisata*, 4(1), h. 72–84. doi: 10.22146/jnp.6686.

- Setyowati, R. M. (2010) 'Strategi Komunikasi yang Mendukung Perkembangan Pariwisata Berbasis Ekonomi Kerakyatan', *Jurnal The Messenger*, 2(2), h. 11–15.
- Singgalen, Y. A., Sasongko, G. and Wiloso, G. P. (2017) 'Institutional Analysis of Community-Based Tourism's Sustainability (Case of Kasbi Community in North Halmahera)', *Sodality*, 6(3), pp. 198–200.
- Singgalen, Y. A., Sasongko, G. and Wiloso, P. G. (2018) 'Tourism Destination in Remote Area: Problems and Challenges of Tourism Development in North Halmahera as Remote and Border Areas of Indonesia-Philippines', *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 6(3), h. 175–186. doi: 10.21776/ub.jitode.2018.006.03.04.
- Singgalen, Y. A., Sasongko, G. and Wiloso, P. G. (2019) 'Ritual Capital for Rural Livelihood and Sustainable Tourism Development in Indonesia', *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, 25(2), pp. 115–125. doi: 10.7226/jtfm.25.2.115.
- Sulaiman, A. I., Sugito, T. and Sabiq, A. (2017) 'Komunikasi Pembangunan Partisipatif untuk Pemberdayaan Buruh Migran', *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 13(2), h. 233. doi: 10.24002/jik.v13i2.734.
- Susilo, B. E., Avenzora, R. and Hermawan, R. (2018) 'Potensi Folklor untuk Pengembangan Ekowisata di Kabupaten MAPPI Provinsi Papua', *Media Konservasi*, 23(1), h. 18–27.
- Sutarya, I. G. (2017) 'Bali dalam Dilema Pariwisata dan Budaya', *Jurnal Ilmiah Agama*, 2(2), h.. 60–65.
- Taylor, S. R. (2017) 'Issues in measuring success in community-based Indigenous tourism: elites, kin groups, social capital, gender dynamics and income flows', *Journal of Sustainable Tourism*. Taylor & Francis, 25(3), pp. 433–449. doi: 10.1080/09669582.2016.1217871.
- Vargas-Sánchez, A., Porrás-Bueno, N. and Plaza-Mejía, M. de los Á. (2011) 'Explaining residents' attitudes to tourism: Is a universal model possible?', *Annals of Tourism Research*, 38(2), pp. 460–480. doi: 10.1016/j.annals.2010.10.004.
- Waskita, D. (2005) 'Komunikasi Pembangunan Untuk Pemberdayaan', *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 1(1), h. 32–40.
- Watie, E. D. S. (2016) 'Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)', *Jurnal The Messenger*, 3(2), h. 69. doi: 10.26623/themessenger.v3i2.270.
- Widiantoro, D., Sukarti and Budiharto, S. (2017) 'Pelatihan Komunikasi Interpersonal Untuk Meningkatkan Kohesivitas Kelompok Pada Karyawan Hotel X Yogyakarta', *Jurnal Intervensi Psikologi (JIP)*, 9(2), h.. 155–168. doi: 10.20885/intervensipsikologi.vol9.iss2.art 2.
- Wiradiputra, F. A. and Brahmanto, E. (2016) 'Analisis Persepsi Wisatawan Mengenai Penurunan Kualitas Daya Tarik Wisata Terhadap Minat Berkunjung', *Pariwisata*, III, No.2(2), h.. 129-137 ISSN: 2355-6587.
- Yadnya, A. I. P. and Adikampana, I. M. (2019) 'Respon Masyarakat Lokal terhadap Pengembangan Kebun Raya Gianyar sebagai Destinasi Pariwisata di Desa Kerta', *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 7(2), h. 398–403.
- Zaidan, E. and Kovacs, J. F. (2017) 'Resident Attitudes Towards Tourists and Tourism Growth: a Case Study From the Middle East, Dubai in United Arab Emirates', *European Journal of Sustainable Development*, 6(1), pp. 291–307. doi: 10.14207/ejsd.2017.v6n1p291.
- Zhang, C., Fyall, A. and Zheng, Y. (2015) 'Heritage and tourism conflict within world heritage sites in China: a longitudinal study', *Current Issues in Tourism*, 18(2), pp. 110–136. doi: 10.1080/13683500.2014.912204.

Zhang, J. J., Wong, P. P. Y. and Lai, P. C. (2018) 'A geographic analysis of hosts' irritation levels towards mainland Chinese cross-border day-trippers', *Tourism Management*. Elsevier Ltd, 68(1), pp. 367–374. doi: 10.1016/j.tourman.2018.03.011.

Zubair, A. (2017) 'Fenomena Facebook: Keterlibatan Teknologi Komunikasi dalam Perkembangan Komunikasi Manusia', *Jurnal ASPIKOM*, 1(1), h. 60. doi: 10.24329/aspikom.v1i1.8.